

Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan *Civil Society*

Muhammad Novan Prasetya

Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama Medan

Email : muhnovanprasetya@gmail.com

ABSTRACK

Indonesia is a country that has marine resources are very abundant, lies in the archipelago consisting of not less than 17.000 islands with 13.466 islands have been named, and thousands of kilometers of coastline. A total of 92 outermost islands as the baseline of the territorial waters of Indonesia toward the open sea has been registered to the United Nations (UN) and the country has a coastline of 95.181 km and is located in a very strategic position between Asia and Australia as well as the Indian Ocean and the Pacific. Indonesia was once known as the State Maritime for marine culture is highly developed in ancient times, such as Bugis also known by sailors tribes that roam to foreign countries, or fleets of Srivijaya and Majapahit mighty. Besides culture Maritime, Indonesia also has a wealth of sea that included most of the world, the character of the topography of the sea Indonesia is very diverse because it is located on the boundary line of the tectonic plates makes it unique compared to other countries, however, over time, with the wealth of the abundant, Maritim identity of this country as comfortable as possible. These days made us aware that Indonesia has lost his pride. Opening song "My grandmother was a sailor" discordant chanting tub. Various problems get bigger maritime accumulate. A fact bitterly sad when the islands of Sipadan and Ligitan chipped from Indonesia, two of the island that has the beauty and biological richness. Not to mention the Ambalat island has abundant reserves of crude oil are still in dispute. Currently Indonesian Maritime Culture as a ship without a captain, if not immediately created awareness Maritime / rebuilt. In this paper, the author tries to present the synergy of the role of the State and Civil Society in rebuilding the Maritime culture have faded or even begin to disappear.

Keywords: Maritime Culture, the State (Government), Civil Society, Synergy.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah, terbentang dalam gugusan kepulauan yang terdiri tidak kurang dari 17.000 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama, dan ribuan kilometer garis pantai. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (UN) dan Negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia pernah dikenal sebagai Negara Maritim karena budaya kelautan yang sangat maju di zaman dahulu, seperti suku Bugis yang dikenal juga dengan suku pelaut yang menjelajah hingga ke mancanegara, atau armada laut Sriwijaya dan Majapahit yang perkasa. Selain kebudayaan Maritim, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang termasuk paling besar di dunia, karakter topografi laut Indonesia yang sangat beragam karena terletak di batasan garis lempeng tektonik menjadikannya unik dibandingkan negara-negara lain, Namun, seiring berjalannya waktu, dengan kekayaan yang melimpah tersebut, identitas Maritim negara ini seperti terlupakan. Dewasa ini semakin menyadarkan kita, bahwa Indonesia semakin kehilangan kebanggaannya. Bait lagu "Nenekku seorang pelaut" bak lantunan yang sumbang. Berbagai permasalahan maritim kian lama kian menumpuk. Menjadi fakta pahit yang menyedihkan ketika pulau sipadan dan ligitan terkelupas dari

Indonesia, dua pulau yang memiliki keindahan dan kekayaan hayati. Belum lagi pulau ambalat yang mempunyai cadangan minyak mentah yang melimpah masih menjadi sengketa. Saat ini Budaya Maritim Indonesia sama seperti sebuah kapal yang tak bernakhoda, jika kesadaran Maritim tidak segera diciptakan/dibangun kembali. Dalam Tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sinergitas peran Negara dan Civil Society dalam membangun kembali kebudayaan Maritim yang telah memudar atau bahkan mulai menghilang.

Kata kunci: Kebudayaan Maritim, Negara (Pemerintah), Civil Society, Sinergi.

I. Menghayati Sejarah Maritim Nusantara

Nusantara pada masa lampau sebelum muncul konsep Indonesia sangat jelas memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Wilayah laut Indonesia yang merupakan dua pertiga wilayah Nusantara mengakibatkan yang sejak masa lampau, Nusantara diwarnai dengan berbagai pergumulan kehidupan di laut. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Sayangnya, setelah mencapai kejayaan budaya bahari, Indonesia terus mengalami kemunduran, terutama setelah masuknya VOC dan kekuasaan kolonial Belanda ke Indonesia. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 antara Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua raja tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya kepada Belanda.

Sejak itu, terjadi penurunan semangat dan jiwa Maritim bangsa Indonesia, dan pergeseran nilai budaya, dari budaya Maritim ke budaya daratan. Catatan penting sejarah Maritim ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim yang mempunyai daerah perikanan laut tak kurang dari 6,85 juta km² dan diperkirakan daerah tersebut memiliki kandungan produksi ikan 10 juta ton pertahunnya, namun, dengan potensi kelautan yang berlimpah itu masyarakat Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi tersebut. Hal ini diakibatkan oleh paradigma pembangunan yang lebih memprioritaskan

masyarakat perkotaan dan pertanian dipedalaman sehingga kurang memperhatikan kehidupan masyarakat di daerah pesisir dan masih sangat kurang proporsinya jika dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya seperti bidang pertanian, industri, perhubungan politik dan sebagainya. Hal tersebut mungkin berkaitan dengan pengalaman sebagai bangsa Indonesia yang semenjak memproklamkan kemerdekaannya lebih banyak diwarnai dengan persoalan-persoalan kebaratan daripada persoalan-persoalan kebaharian, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia naluri kebahariaannya semakin tumpul sehingga kurang mampu melihat apalagi bertindak untuk memanfaatkan dunia kebahariaan.

Secara geografis wilayah Indonesia merupakan kawasan kepulauan yang menempatkan laut sebagai jembatan penghubung bukan sebagai pemisah. Dengan demikian, penguasaan terhadap laut merupakan suatu keharusan bagi masyarakat (*civil society*) yang menghuni pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kondisi semacam ini, membentuk mereka sebagai manusia yang akrab dengan kehidupan laut. Selain itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia letaknya sangat strategis dalam konteks perdagangan laut internasional antara dunia barat dan dunia timur, maka itu dalam tulisan ini, penulis berusaha memberi gambaran sinergitas yang mesti Negara (Pemerintah) ciptakan terhadap pembangunan keMaritiman Indonesia yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap penentuan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan masalah-masalah keMaritiman, serta mengembangkan kesadaran kita sebagai masyarakat (*civil society*) akan kekayaan Laut dan keagungan Maritim kita.

II. Indonesia dan Laut

Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan yang lautnya memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara bahkan sejak zaman lampau, nenek moyang Bangsa Indonesia telah mengarungi laut, berlayar dan berdagang dari satu tempat ke tempat lain menjelajah Nusantara bahkan Mancanegara. Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (UN). Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%),

yang terdiri 2.012.392 km² Perairan Pedalaman, 0,3 juta km² Laut Teritorial, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.

Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja Maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Sehingga, sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan sebagai penunjang perekonomian negara ini. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki peranan strategis. Terutama dibandingkan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari 2011 sampai dengan 2015 selalu mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan sebesar 15,64 persen. Nilai PDB subkategori perikanan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 berturut-turut adalah Rp 163,5 triliun, Rp 184,3 triliun, Rp 210,7 triliun, Rp 245,48 triliun, dan Rp 292,13 triliun. Kenaikan yang signifikan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan pendapatan barang dan jasa di subkategori perikanan terus mengalami peningkatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB Nasional pada tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata sebesar 13,42 persen. Subkategori perikanan memberikan kontribusi terhadap kelompok pertanian pada tahun 2015 sebesar 2,53 persen. Adapun kontribusi rata-ratanya pada periode 2011–2015 sebesar 2,26 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi perikanan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012, laju pertumbuhan mengalami perlambatan sebesar 6,29 persen. Sementara tahun 2015 mengalami laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,37 persen. Laju pertumbuhan subkategori perikanan jauh melampaui laju pertumbuhan kelompok pertanian dan PDB Nasional yang berada di angka 4,02 persen dan 4,79 persen. Laju pertumbuhan subkategori perikanan ada tahun 2015 sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi Tuna, Cakalang, Tongkol (TTC) sebesar 6,63 persen, udang budidaya sebesar 9,09 persen, dan produksi rumput laut sebesar 9,73 juta ton. Sumbangan PDB perikanan terhadap negara. Bagaimanapun, catatan-

catatan ini semakin menguatkan anggapan bahwa sektor maritim sangat potensial dikembangkan sebagai penunjang ekonomi nasional. Dan tentu saja, sektor kelautan tidak hanya menghasilkan produk perikanan.

Untuk Lebih jelasnya Persentase Masing-masing Bidang tersebut terhadap PDB untuk tahun 2001-2005 dapat dilihat pada gambar tabel dibawah ini:

Gambar Tabel 1. Distribusi Persentasi PDB Sektor Kelautan 2010-2015



Sumber: Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015)

Dari gambar tabel diatas kita bisa melihat cukup baiknya PDB Kelautan dari tahun ke tahun. Namun, jika tidak ada upaya yang nyata oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai presentasi lebih dari 22 persen, jika dibandingkan dengan Negara lain yang memiliki garis pantai yang lebih pendek dari Indonesia maka kita masih kalah jauh dari Negara Negara lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan terhadap PDB berbagai Negara

No	Negara	Panjang Pantai (Km)	Luas Perairan (Km ²)	Kontribusi Bidang Kelautan terhadap PDB	
				Nilai	%
1	Thailand	2.800	420	US\$ 212 milyar (2008)	
2	Korea Selatan	2.713	85.838	US\$ 14,7 trilyun (1992)	37,00
3	Kanada			US\$ 11,1 milyar (2005)	7,72
4	Vietnam	3.260	>1 juta	VND 659.120 milyar (2007)	57,63
6	China	32.000	3 juta	RMB 2.966,2 Milyar (2008)	15,80
7	Amerika	19.800		US\$ 138,25 Milyar (Ocean economy, 2004)	1,20
				US\$ 11,4 triliyun (Coastal economy, 2007)	83,00

Sumber: data BPS diolah oleh Tridoyo Kusumastanto dkk (2012)

Walaupun Indonesia memiliki potensi kekayaan laut dan pesisir yang besar, namun sayangnya hingga saat ini belum menjadi basis ekonomi bagi pembangunan nasional. Hal ini dapat diindikasikan bahwa masih belum optimalnya kontribusi yang diberikan oleh sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sebagai perbandingan, ekonomi kelautan Amerika mampu menyumbang hingga 83 persen bagi PDB nasionalnya sedangkan Korea Selatan bidang kelautannya sanggup menyumbang 37% dari PDBnya. Indonesia yang luas wilayah lautnya hampir 70% dari total seluruh wilayahnya, hingga kini kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasionalnya masih dibawah 30%. jika dilihat di Negara eropa kontribusi bidang kelautan di negara-negara Eropa sudah cukup besar. Kontribusi PDB Norwegia bahkan ditopang hampir 60 persen dari bidang ekonomi yang berbasis sumberdaya kelautan. Proporsi ini bisa dikatakan besar, jika dilihat luas pantai dan kekayaan laut mereka memang relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan Indonesia.

III. Sinergitas Negara(Pemerintah) dan *Civil Society*

Unsur yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pembangunan maritim adalah negara (unsur vertikal) dan *civil society* (unsur horinsontal). Kedua unsur ini merupakan nadi dan tulang punggung pelaksanaan pembangunan menuju negara maritim. Kedua unsur ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam strategi operasional pembangunan dalam payung besar wawasan maritime. Kajian-kajian tetang pembangunan dan pengembangan industri maritim menjadi tumpukan sampah dokumen saja, jika wawasan maritim Indonesia tidak menjadi visi-misi jangka panjang. Wawasan maritim bak semangat pembangunan negara maritim. Untuk itu bidang pendidikan semangat (*spirit*) kemaritiman perlu disiapkan dan menjadi pilar utama bagi kebijakan pendidikan nasional Indonesia.

Selain wawasan maritim, perlu adanya mata rantai operasional wawasan tersebut. Jika wawasan maritim Indonesia sebagai semangat (*spirit*) pembangunan negara maritim, maka kebijakan menjadi kerangka tubuh dan urat nadi dalam pembangunan maritim. Kebijakan mengatur strategi operasional wawasan maritim Indonesia. Negara (*state*) sebagai produsen memiliki peran penting untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan kelautan dan sanksi kelautan. Kebijakan juga menjadi obat yang menghilangkan egoisme sektoral.

Civil society menjadi tulang punggung pembangunan maritim. Inovasi dan orientasi *civil society* dalam pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan maritim Indonesia. *Civil Society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya". *Civil society* adalah masyarakat yang senantiasa melakukan inovasi dan kerjasama satu sama lain untuk mewujudkan keswasembadaan dan keswadayaan melalui kesadaran wawasan maritim. Langkah *civil society* tak akan berjalan mulus tanpa stimulus negara melalui kebijakannya dalam pembangunan,perlindungan dan pengembangan maritim Indonesia. *Civil society* mencakup kalangan akademisi, nelayan, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Sebagai penduduk terbesar keempat di dunia (mencapai 238 juta jiwa), Indonesia memiliki potensi besar menciptakan *civil society* yang kuat.

Ketika kita berbicara tentang *civil society*, maka kita harus berbicara tentang negara. Artinya pembicaraan tentang *civil society* tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang negara. Keduanya bagaikan bagian-bagian tubuh yang berbeda letak namun tetap bersinergi. Meskipun antara *civil society* dan Negara memiliki batas-batas sendiri. Namun diantara keduanya tidak perlu dijadikan lawan persaingan di dalam memperebutkan kepentingan/tujuannya masing-masing. Keduanya baik *civil society* maupun negara seharusnya saling bersinergi untuk membangun negara, Indonesia.

Dan salah satu upaya penting yang Negara harus lakukan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan adalah dengan bekerja sama dengan pihak Keamanan diantaranya TNI Angkatan laut, Pihak TNI harus bisa mengawasi setiap pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak asing maupun penjualan ikan oleh nelayan sendiri tetapi tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada Negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan anggaran belanja pihak TNI AL sehingga memiliki dana untuk membeli kapal kapal patroli untuk mengawasi perairan perairan Indonesia dari tangan tangan jahil. Sistem drone juga perlu diadakan untuk mengawasi perairan Indonesia sehingga jika terjadi masalah pemerintah atau pihak terkait dapat mengetahui masalah yang terjadi dan segera mengambil tindakan.

Kelautan Indonesia kedepan diharapkan dapat menjadi arus utama *mainstream* pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan lautbeserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Keinginantersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu:

1. Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Menetapkan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka
4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan

5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

Untuk mendukung pembangunan sektor kelautan maka pemerintah juga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 di Bidang Kelautan, yakni sebagai berikut:

- 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari**, antara lain, melalui (a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya sertawawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan mensosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
- 2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan** yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.
- 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal hal terkait di dalamnya**, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut *United Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982*. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986 sehingga mempunyai kewajiban, antara lain, (a) menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982; (b) menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen); (c) menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut; (d) menyampaikan laporan data nama geografis sumber dayakelautan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia juga perlu pengembangan dan penerapan tata kelola dan kelembagaan nasional di bidang kelautan, yang meliputi (a) pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagai Negara

Kepulauan serta (b) pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

4. **Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang meliputi (a) peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b) pengembangan system *monitoring, control, and surveillance* (MCS) sebagai instrumen pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; (c) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.
5. **Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan** yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.
6. **Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut** dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan *early warning system*; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; serta (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.
7. **Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir** dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

Akankah Indonesia jadi Negara Maritim atau penulis maksud apakah Indonesia bisa kembali menjadi Negara Maritim? Ditinjau dari enam pokok dalam pembentukan kekuatan laut menurut pandangan Alfred Thayer Mahan (1860-1940) Indonesia memiliki letak geografis yang potensial diantara Benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia; bentuk bumi kepulauan yang mendorong manusia berorientasi ke laut, luas wilayah laut hingga lebih dari 6 juta km²; dan penduduk sebesar 238 juta jiwa. Melihat potensi ini Indonesia memiliki *kans* besar untuk menjadi negara maritim yang besar di kancah ASEAN Community 2016. Luas lautan dan SDM Indonesia duduk diperingkat pertama di kawasan ASEAN. Potensi ini ada, namun bak harta yang terpendam, harta atau potensi ini perlu digali dengan penanaman spirit wawasan

Maritim. Lembaga-lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam mendorong bangsanya menuju ke arah kekuasaan di laut. Sinergitas antara *civil society* dan negara, untuk mewujudkan untuk membangun Indonesia Negara Maritim.

IV. Kesimpulan

“Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau”
(A.B lapian)

*“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali
Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga
Bangsa pelaut armada militer
Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi
Irama gelombang lautan itu sendiri”*
(Ir. Soekarno, 1953)

Dari dua prasa dan tulisan ini penulis berharap, bersama kita dapat melihat potensi dan realita kemaritiman Indonesia, mengajak bahkan memaksa kita segera berbenah untuk membangun kembali jejak sejarah yang terhapus. Wawasan maritime dalam hal ini *civil society*, dan Negara menjadi elemen penting pembangunan Negara Maritim. Kedua elemen ini memiliki peran yang mungkin terlihat berbeda namun saling berkaitan bak analogi sistem tubuh. Elemen *pertama* dalam pembangunan maritim adalah Negara. Suatu tubuh membutuhkan kerangka dan urat tubuh dan urat nadi untuk berdiri tegak, yang terwujud dalam kebijakan maritim. Elemen *kedua*, *Civil Society* menjadi tulang punggung pembangunan Maritim. Namun, untuk menyatukan kedua elemen tersebut kita butuh “pengikat” (titik temu) antara Negara dan *civil society*, yaitu wawasan Maritim. Wawasan Maritim (doktrin Maritim) bak semangat (*spirit*) pembangunan Negara Maritim yang sebenarnya harus ditanamkan sejak dini dan bahkan penulis merasa itu harus di masukkan dalam Kurikulum sejak Sekolah Dasar (SD), karena sebenarnya agak terasa “sedikit lucu” bila sebuah Negara yang memproklamirkan dirinya adalah Negara Maritim atau Kepulauan tapi rakyatnya (SDMnya) tidak mempunyai pendidikan Kemaritiman sejak dini setidaknya ini yang di rasakan penulis saat masih di bangku sekolah (SD-SMA) bahkan hingga saat ini . Tanpa adanya wawasan maritim Negara dan *civil society* tidak akan membentuk Indonesia sebagai Negara Maritim. Aktivasi wawasan Maritim sejak dini yang harus dimulai dari sekarang sebagai pengikat antara Negara dan *civil society*, menjadi elemen yang sangat penting agar kita semua sampai ke anak-cucu kita sadar betapa agungnya sejarah ke-Maritiman Negara kita dulu untuk pembangunan Negara Maritim Indonesia kini dan selamanya.

Daftar Pustaka

- Sondakh, B. K., 2010. *Sejarah Maritim Indonesia: Meretas Sejarah Menegakkan Martabat Indonesia*, Institute for Maritim Studies.
<http://indomaritimstitute.org/wpcontent/uploads/2010/10/Sejarah-Maritim-Indonesia.pdf> di akses pada tanggal 3 Desember
- <https://id.wikipedia.org/wiki/GarisPantaiIndonesia>.di akses pada tanggal 3 Januari 2017
- Mutiara Ilma Islami. 2014. Merajut Kembali Negara Maritim Indonesia melalui Aktivasi Tiga Elemen (Negara, *Civil Society*, dan Wawasan Maritim).
- Anonim. 2014. *Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap*. <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap>. di akses pada tanggal 4 Desember
- Nono.2014. *Nono Sampono nyatakan urgensi payung undang-undang kemaritiman*.
<http://metroballi.com/2014/08/27/nono-sampono-nyatakan-urgensi-payung-undang-undang-kemaritiman/>. di akses pada tanggal 4 Desember
- Tridoyo Kusumastanto dkk.2012. *Kebijakan EKonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru*.Dewan Kelautan Indonesia.
- Tridoyo Kusumastanto. 2012.*Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*.<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20%20tridoyo%20kusumastanto.pdf>. di akses pada tanggal 8 Desember
- Alferd Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History*, hal.1660-1783 .1660-1783 (Dover Military History, Weapons, Armor)
- BPS.2014. *Pendapatan Domestik Bruto*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=1.di akses pada tanggal 8 Desember